

Abstrak

Sistem Jaminan Halal adalah mekanisme yang harus dimiliki produsen untuk mengajukan sertifikasi Halal ketika ingin mengajukan permohonan ke BPJPH sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan sertifikasi Halal. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur standarisasi SJH dalam setiap perusahaan apakah sudah sesuai atau tidak khususnya UD Matahari dan UD Hasil Laut Prima Kabupaten Sumenep. Karena dalam praktiknya, banyak SJH yang tidak terstandarisasi menjadi HAS 23000. Manual SJH wajib saat mengajukan sertifikasi produk Halal baru atau yang ditingkatkan, jadi suatu perusahaan yang telah menerapkan SJH di produknya, maka dipastikan produknya ini halal dan pantas untuk mendapatkan sertifikasi halal jika produknya belum mendapatkan sertifikasi halal..

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu dengan melakukan pengamatan dan pengambilan data secara langsung yang sesuai dengan metode. Subjek penelitian ini adalah UD Matahari dan UD Hasil Laut Prima. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sedangkan untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian yaitu di Kalianget dan Prenduan.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa UD Matahari kurang menerapkan SJH secara maksimal namun sudah lumayan banyak dalam produksinya memenuhi standar dari SJH. Kelemahan penerapan SJH pada UD Matahari terletak pada minimnya lemahnya koordinasi Tim manajemen Halal, tidak adanya prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, tidak adanya kemampuan telusur, tidak adanya audit internal, tidak adanya kaji ulang manajemen. UD Hasil Laut Prima belum menerapkan SJH secara maksimal, namun sudah ada dalam produksinya yang memenuhi dari standar SJH, seperti bahan, produk, fasilitas produksi. Faktor dari UD Hasil Laut Prima belum melakukan pengajuan sertifikasi halal yakni: a) Belum berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Secara Merata, b) Tidak Taunya Penejelasan Tentang Sertifikasi Halal, c) Konsumen serta Pelaku Usaha Kurang Mempunyai Pemahaman Hukum

Kata Kunci: *Sistem Jaminan Halal*.

Abstract

The Halal Assurance System is a mechanism that producers must have to apply for Halal certification when they wish to submit an application to BPJPH as the authority authorized to issue Halal certification. This research was conducted to measure the standardization of SJH in each company whether it was appropriate or not, especially UD Matahari and UD Hasil Laut Prima, Sumenep Regency. Because in practice, many HAS are not standardized to HAS 23000. The SJH Manual is mandatory when applying for new or upgraded Halal product certification, so a company that has implemented HAS in its products, it is certain

that this product is halal and deserves to get halal certification if its product has not yet received halal certification.

The research method used is qualitative. This type of research is field research or field research, namely by observing and collecting data directly according to the method. The subjects of this study were UD Matahari and UD Hasil Laut Prima. The data used in this study are primary data and secondary data, while the data collection technique is carried out by means of interviews, observation, and documentation. The data analysis phase is carried out by means of data reduction, data display, and drawing conclusions. The research locations are in Kalianget and Prenduan.

The results in this study indicate that UD Matahari has not implemented SJH optimally, but quite a lot of its production has met the standards of SJH. Weaknesses in implementing HAS at UD Matahari lie in the lack of coordination between the Halal management team, the absence of written procedures for critical activities, the lack of traceability, the absence of internal audits, and the absence of management reviews. UD Hasil Laut Prima has not implemented HAS to the fullest, but already has production that meets HAS standards, such as materials, products, production facilities. The factors that UD Produk Laut Prima have not submitted for halal certification are: a) The Halal Product Assurance Law is not yet in force, b) There is no explanation regarding Halal Certification, c) Consumers and Business Actors Lack Legal Understanding

Keywords: Halal Assurance System.